DEMOKRASI DAN PENGUATAN MASYARAKAT SIPIL DI DESA DORANG

(Studi Pemilihan Kepala Desa (Lurah) di Desa Dorang Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sosiologi

Disusun Oleh:
Rahayu Mustika
07720011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Rahayu Mustika

Nomor Induk : 07720011

Program Studi : Sosiologi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah asli hasil karya / penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya / penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 6 Juni 2011

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
14EB1AAF403854488
6000 DJP

Rahayu Mustika
NIM. 07720011

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03 / RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi / Tugas Akhir
Lamp : 4 Bendel Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum. wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Rahayu Mustika
NIM : 07720011
Judul Skripsi : ***DEMOKRASI DAN PENGUATAN MASYARAKAT SIPIL DI DESA DORANG (Studi Pemilihan Kepala Desa (lurah) di Desa Dorang Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)***

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Program Studi Sosiologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Sosiologi.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi / tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. wr. wb.

Yogyakarta, 12 Juni 2011
Pembimbing

Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si
NIP.19750312 200604 1001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274) 585300 Fax. 519571 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/395.a./2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Demokrasi Dan Penguatan Masyarakat Sipil di Desa Dorang (Studi Pemilihan Kepala Desa di Desa Dorang Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Rahayu Mustika

NIM : 07720011

Telah Dimunaqasyahkan pada : 28 Juni 2011

Dengan nilai :*(87) A/B*

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si
NIP. 19750312 200604 10011

Penguji I

Dadi Nurhaedi, S.Ag, M.Si
NIP. 19711212 199703 1002

Penguji II

Sulistyaningsih, S.Sos, M.Si
NIP. 19761224 200604 2001

Yogyakarta, 1 Juli 2011
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
DEKAN

Prof. Dr. Dudung Abdurrahman, M.Hum
NIP. 19630306 198903 1010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Y O G Y A K A R T A

MOTTO

"Sesungguhnya

bersama kesulitan ada kemudahan".

Esok akan merekah bunga yang harum aromanya

mengusir segala kesedihan

dan menjadi penghibur hati.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Ibu dan Bapak tercinta:

yang telah mendidikku dengan segala pengorbanannya, kasih sayangnya
dan semangat berjuang yang tak akan kenal lelah

adikku tersayang:

dukunganmu merupakan semangat bagiku

tatkala diriku lagi terpuruk dan pesimis

sahabat- sahabatku

yang telah rela mengorbankan waktu untukku

dan untuk "Dia" yang selalu ada di saat aku butuh motivasi

dan "Dia" juga selalu mewarnai hidup-hidupku dengan semangat baru

serta untuk semua orang yang aku cintai

Almamaterku:

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pilkades (pemilihan kepala desa) adalah refleksi bagaimana demokrasi itu coba diimplimentasikan. Di sisi lain, pilkades merupakan sarana sirkulasi elit dan transfer kekuasaan ditingkat lokal. Dalam konteks ini pilkades diharapkan secara langsung membuat masyarakat mengerti posisi mereka sebagai proses interaksi antara rakyat dan pemerintah sebagai wujud adanya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Partisipasi merupakan keterlibatan suka rela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri. Sedangkan yang dimaksud partisipasi dalam penelitian ini adalah keterlibatan aktif warga masyarakat desa dalam sebuah proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang dilakukan di Desa Dorang Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara Jateng. Motif adalah daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, begitu juga dengan motif yang dimaksud didalam penelitian ini, yaitu motif yang mendasari masyarakat untuk melakukan melakukan partisipasi dalam pemberian suara kepada salah satu calon kades pada pilkades di waktu itu. Dan juga bagaimana praktek demokrasi yang selama ini sudah terbangun didalam penguatan masyarakat sipil.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana model partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa, serta bagaimana implikasi praktek demokrasi yang ada di Desa Dorang terhadap penguatan masyarakat sipil. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang berupa wawancara yang ditujukan kepada masyarakat yang merupakan informan dalam penelitian ini, dan juga menggunakan metode observasi, yang dibutuhkan untuk dapat memahami proses berlangsungnya Pilkades dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara, yang terakhir adalah metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan data-data yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Sedangkan dalam analisa datanya penelitian ini menggunakan cara deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena partisipasi masyarakat Desa Dorang dalam pemilihan kepala Desa yang relevan dengan tujuan penelitian. Dari penelitian tersebut, maka didapatkan informasi mengenai motif yang melatar belakangi masyarakat di dalam ikut berpartisipasi pada pemilihan kepala desa pada waktu itu dan juga mengenai praktek demokrasi yang ada di Desa Dorang tersebut baik pada pemilihan kepala desa pada tahun 2007 maupun pada tahun 2002 sebelum ada pilkada langsung 2005..

Keyword: Demokrasi, partisipasi, penguatan masyarakat sipil.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ.
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَعَلَى آلِهِ
وَرَسُوْلُهُ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufiq serta hidayah-Nya. Hanya itulah ungkapan yang patut penulis panjatkan, atas terlaksananya penelitian yang merupakan faktor penentu dalam penyusunan *skripsi ini sebagai tugas akhir dalam menempuh strata satu. Shalawat serta salam* semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, serta segenap ummatnya yang mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, pengertian, pengarahan, serta saran dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Dudung Abdurrahman, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dadi Nurhaedi, S.Ag., M.Si selaku Kepala Jurusan Program Studi Sosiologi.
3. Ibu Sulistiyaningsih, S.Sos., M.Si, selaku PA Sosiologi '07 Fakultas Ilmu Sosial dan Homaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ayahanda Sujianto dan Ibunda tercinta Darwati, yang telah memotivasi dan membimbing dalam menjalani hidup, dan juga adik Yessi Ristiana, terima kasih banyak atas kasih sayang dan dukungan yang selalu datang tatkala pikiran sedang penat karena skripsi.
7. Insan dengan inisial Abi Marta, terima kasih banyak dalam setiap pengertian dan dukunganmu serta motivasi yang telah diberikan selama ini.
8. Teman-teman kelas Sosiologi '07, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih untuk semua bantuannya dan diskusi hangat selama ini. Insya Allah perjalanan kita selama kuliah akan menjadi kenangan terindah di diri kita maupun di FISHUM.
9. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membagun senantiasa peyusun harapkan. Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima oleh Allah SWT.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Juni 2011

Penyusun

Rahayu Mustika
07720011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR..... iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

HALAMAN MOTTO v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK..... vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Pembatasan Masalah 5
D. Tujuan dan Kegunaan peneliti 6
E. Telaah Pustaka 7
F. Kerangka Teori 9
G. Metode Penelitian 16
H. Sistem Pembahasan 23

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB II. GAMBARAN UMUM DESA DORANG

A. Keadaan Demografi 25
B. Letak Geografis 26
C. Keadaan Iklim 28
D. Keadaan Sosial Keagamaan 28
E. Keadaan Pendidikan 30
F. Keadaan Ekonomi 32

BAB III. PARTISIPASI POLITIK DALAM PILKADES DAN PENGUATAN MASYARAKAT SIPIL

A. Partisipasi Masyarakat Dorang dalam Pilkades 34
1. Partisipasi : Dari Otonom ke Mobilisasi 36
a. Partisipasi yang Otonom 40
b. Partisipasi karena Mobilisasi..... 45
c. Partisipasi: Antara Otonomisasi vs Mobilisasi 48
2. Bentuk-bentuk Dasar Partisipasi 52
3. Motif-motif Masyarakat dalam Partisipasi 59
a. Motif Sosial 59
b. Motif Ekonomi 62
c. Motif Politik 64
B. Partisipasi Politik Masyarakat Dorang dalam Pilkades dan Penguatan Masyarakat Sipil 67
1. Partisipasi Politik dan Penguatan Masyarakat Sipil 68
a. Partisipasi Masa Orde Baru dan Penguatan Masyarakat Sipil 70
b. Partisipasi Pasca Pilkada dan Pelemahan Masyarakat Sipil 73

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Penguatan Masyarakat Sipil: Antara Partisipasi Pragmatisme dan Partisipasi Sadar 74

2. Menguatnya Masyarakat Sipil Pada Pilkades Era Sebelum Pilkada Langsung 76

a. Partisipasi Otonom 76

b. Meningkatnya Partisipasi 77

c. Penguatan Masyarakat 79

3. Tipologi Partisipasi Politik dan Masyarakat Sipil pada Pilkades di Desa Dorang 80

a. Keikutsertaan Partisipasi 81

b. Mobilisasi Massa 85

c. Anjloknya Partisipasi Politik 86

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan 90

B. Saran-saran 91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel I. Jumlah Penduduk Menurut Tingkatan Umur 26

Tabel II. Luas Tanah Desa Dorang Berdasarkan Fungsinya 27

Tabel III. Batas Wilayah Desa Dorang 27

Tabel IV. Keadaan Geografis 28

Tabel V. Sarana Peribadatan di Desa Dorang 29

Tabel VI. Sarana Pendidikan Menurut Jenis Sekolah dan Statusnya 31

Tabel VII. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Dorang 31

Tabel VIII. Mata Pencaharian Penduduk Desa Dorang 32

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 dari kekuasaan yang dipegang selama kurang lebih 32 tahun agaknya akan banyak mempengaruhi bangsa Indonesia menimbulkan banyak kegamangan dan kecemasan. Jika demokrasi adalah *peaceful resolution on conflict* (harapan perdamaian dalam konflik), cenderung akan menimbulkan penyelesaian konflik melalui cara-cara yang tidak demokratis, seperti penggunaan *mob politics* (mobilitas politik), *money politic* (politik uang) dan cara *undemocratic* (tidak democratic) lainnya. Perkembangan seperti ini jelas menjadi problem bagi perkembangan demokrasi.[1]

Secara teoritis, *demokrasi* adalah suatu kompleks menyeluruh yang terdiri dari konsep-konsep, aturan-aturan, dan tindakan-tindakan politik. Politik adalah aturan-aturan dan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan usaha-usaha dari sejumlah orang, yang menyangkut kepentingan orang banyak, dari suatu lingkungan tertentu, untuk menduduki secara sah kedudukan-kedudukan dan jabatan-jabatan tertentu yang ada di dalam suatu sistem politik tertentu. Politik juga menyangkut kesanggupan orang-orang yang menduduki kedudukan-kedudukan dan jabatan-jabatan tertentu untuk memerintah orang-orang lain melakukan sesuatu dan atau menguasai serta mengatur pembagian sumber-sumber *(resources)* yang terbatas dan berharga

[1] *Ibid.*, hlm 10

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang dilakukannya berdasarkan atas konsep-konsep dan aturan-aturan yang berlaku menurut sistem tersebut.[2]

Di dalam pengembangan demokrasi membutuhkan dasar sosial yang kuat, karena itu penguatan terhadap masyarakat sipil (*civil society*), dalam arti bebas, mandiri, dan bertanggung jawab sangatlah penting. Masyarakat sipil dirumuskan sebagai masyarakat etis yang menjunjung nilai-nilai kesetaraan, menghargai kebebasan, terdapat saling kepercayaan (*public trust*), kesukarelaan, persaudaraan, keswadayaan dan kemandirian, terutama dalam berhadapan dengan negara dan kekuatan sipil.[3] Mengenai pemahaman masyarakat sipil sangatlah beragam disamping yang masyarakat sipil padanan kata lainnya yang sering digunakan adalah masyarakat warga atau kewargaan, masyarakat madani yang bahwasanya menurut Dawam Rahardjo, konsep masyarakat madani sebenarnya identik dengan cita-cita islam membangun ummah. Kata madani berasal dari kata *mudun*, madaniyah yang berarti *peradaban*. Dalam bahasa Inggris istilah tersebut disepadankan dengan civilization, sehingga bila dipandang dari segi peralihan istilah kata masyarakat madani mempunyai kedekatan makna dengan istilah civil society.[4] Yang di mana sekarang lebih mengenalnya dengan istilah masyarakat sipil.

Dalam demokrasi kontemporer, masyarakat sipil merupakan salah satu indikator untuk menentukan derajat demokrasi sebuah masyarakat, tidak

[2] M. Amien Rais. *Demokrasi dan Proses Politik.* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm 16

[3] Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori (ed), *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999*, cet ke-1. (Surabaya: Diantama, 2004), hlm. 643

[4] Azhariah Khalidah, *Masyarakat Madani dan Penegakan Hukum,* (Juris : vol II no.2, 2003), hlm. 130

hanya pada level negara tetapi juga sampai struktur pemerintahan terendah, yaitu desa.[5] Menurut Peraturan Pemerintah nomor tahun 72 tahun 2005 tentang desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Secara substansi masyarakat memainkan peran yang dominan dalam menjalankan seluruh aktivitas negara, ketika asas demokrasi ditampilkan yang seharusnya adalah kekuasaan penuh di tangan rakyat. Nilai demokrasilah yang membentuk pola rakyat berkuasa tanpa adanya hegemoni negara yang secara mutlak menghambat proses demokrasi.

Berbicara tentang politik lokal, terutama ditingkat desa, tidak dapat dilepaskan dari dua konteks politik yang melingkupinya, yaitu konteks struktur politik nasional dan struktur politik otentik lokal.[6] Konteks pertama merupakan pencerminan dari desain eksternal yang memberi implikasi luas pada politik lokal. Sedangkan yang kedua adalah mencerminkan desain internal yang berkembang dari struktur sosial ekonomi-budaya dari masyarakat lokal sendiri.

Pemilihan kepala desa (lurah) secara langsung sebagaimana pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden dinilai banyak pihak sebagai kemajuan penting yang bisa dicapai oleh bangsa Indonesia di era transisi yang sedang

[5] Sutoro Eko, *Membangun Good Governance di Desa,* (Yogyakarta: IRE Press, 2003), hlm. 103

[6] *Ibid.*, hlm. 103

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berlangsung. Makna terpenting dari pemilihan langsung itu antara lain; *pertama*, merupakan pengakuan konstitusional atas hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat. *Kedua*, pelembagaan politik peran substansial rakyat sebagai subyekhukum, dan ketiga, diharapkan terciptanya keseimbangan politik makro dan mikro dalam sebuah kehidupan ketatanegaraan kita.[7] Meskipun demikian masih terdapat cara-cara yang *undemocratic* (tidak demokratis) di dalam pelaksanaannya, misalkan ada mobilitas politik, politik uang (*money politic*) yang digunakan sebagai salah satu cara untuk menyukseskan pemilihan kepala desa tersebut.

Dalam pemilihan kepala desa (lurah) para calon mengeluarkan biaya yang digunakan untuk kampanye. Agar kepala desa bisa menarik simpati masyarakat maka biasanya mengadakan slametan. Di dalam mengadakan slametan, biaya yang dikeluarkan adalah untuk membeli makanan, minuman, dan rokok atau tembakau. Di samping cara-cara di atas yang lazim digunakan di dalam kampanye pemilihan kepala desa (lurah) oleh para calon, ada juga diantara para calon yang membagi-bagikan uang kepada para calon pemilih. Uang memang memegang peranan penting di dalam proses pemilihan kepala desa (lurah), Biasanya orang-orang yang tidak atau sedikit sekali mengeluarkan biaya untuk kampanye tidak terpilih, tetapi berbanding terbalik di Desa Dorang tersebut justru yang terpilih dan menjadi kepala desa adalah calon yang biasa saja (yang dimaksudkan dengan biasa saja di sini adalah bila kita lihat dari segi pendidikan ternyata kepala desa yang terpilih hanyalah

[7] Any Rohyati, dkk. *Pilkada Dan Pengembangan Demokrasi Lokal.* (Yogyakarta: Komisi Pemilihan Umum Provinsi DIY, 2006), hlm 3

seorang yang lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas) yang sangatlah jauh bila dibandingkan dengan calon lainnya yang lulusan S1 dari sebuah Universitas ternama).

Terkait dengan fenomena yang terjadi di Desa Dorang dalam pemilihan kepala desa adalah sebaliknya dengan sistem demokrasi yang seharusnya, di mana di dalam pemilihan kepala desa (lurah) di Desa Dorang bahwa ada sebuah hal yang menarik perhatian dan terjadi di Desa Dorang itu, bahwa terdapat sebuah fasilitas yang diperoleh masyarakat (calon pemilih) sebelum melakukan pemilihan kepala desa seperti halnya, dengan adanya sebuah transportasi (mobil angkutan) yang sengaja dipersiapkan untuk dijadikan sebagai alat antar-jemput masyarakat di dalam melakukan pencoblosan (pemilihan) dan hal itu terjadi pada semua para calon kepala desa di Desa Dorang tersebut dan benarkah uang memegang peran penting dalam hal ini yang di mana kita tahu bahwa dalam pemilihan kepala desa itu tidak lepas dari sebuah politik uang (*money politic*), apakah benar masyarakat dalam memilih kepala desa itu tidak dikarenakan uang, dan dari segi pendidikan yang secara *gamblang* bahwa jika dilihat kriteria calon-calon lainnya justru lebih memenuhi syarat sebagai calon kepala desa tetapi justru yang terpilih adalah dari calon yang hanya lulusan SMA.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala desa (lurah) di desa Dorang Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara periode tahun 2002-2007?
2. Bagaimana implikasi praktek demokrasi pada pemilihan kepala desa (lurah) di desa Dorang Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara terhadap penguatan masyarakat sipil?

C. Pembatasan Masalah

Masalah dalam penelitian ini akan dibatasi pada; ingin melihat model partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala desa (lurah) di desa Dorang Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara pada periode 2002-2007, yang di mana akan membandingkan antara model partisipasi pada tahun periode tahun 2002 sebelum diadakannya pemilihan langsung sedangkan dalam pemilihan kepala desa di Desa Dorang pada tahun 2007, sudah diberlakukannya pemilihan langsung pada Pilpres Th 2005 yang kemudian diikuti dengan pemilihan Pilkada hingga Pilkades.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguraikan bagaimana model partisipasi masyarakat di dalam pemilihan kepala desa (lurah) di desa Dorang Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara tahun 2007.

2. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi masyarakat dalam pemilihan kepala desa tersebut.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai syarat memenuhi kewajiban akademik guna memperoleh gelar sarjana strata satu (SI) dalam bidang sosiologi dan juga untuk menambah wacana pemikiran dalam lingkup sosial-politik dalam masyarakat luas.
2. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai problematika yang ada di pemerintahan desa.
3. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kajian tentang demokrasi lokal serta memberi sumbangan analisis yang tajam mengenai sistem demokrasi.
4. Secara praktis, menumbuhkan inspirasi dan motivasi bagi penegak demokrasi di Indonesia terutama dalam rangka menelaah secara kritis dan menanamkan kembali nilai-nilai demokrasi di Indonesia yang masih dalam perkembangan agar tidak salah dalam pengaplikasiaannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Dian Yanuardy, (*Civil Society dan Demokratisasi di Indonesia; Studi atas pemikiran Robert W. Hefner 1985-2002*)[8] dalam penelitian tersebut membahas mengenai pemikiran Robert W. Hefner tentang civil society

[8] Dian Yanuardy, *Civil Society dan Demokratisasi di Indonesia; Studi atas Pemikiran Robert W. Hefner 1985-2002.* (Skripsi Program Perbandingan Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003).

dan demokratisasi di Indonesia yang di mana dalam gagasannya bahwa perlunya demokrasi keadaban dalam masa transisi yang mempunyai ciri meledaknya partisipasi masyarakat dan melemahnya agama, sedangkan dalam penelitian saya yang akan diteliti lebih menitik beratkan pada praktek demokrasi dan pilihan rasional masyarakat memilih pemimpin di dalam pemilihan kepala desa yang ada di Desa Dorang pada tahun 2007.

2. Hasan Abdillah, (*Money Politik dalam Pilkades di Desa Tegal Ampel Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Hukum Islam*[9]*)* dalam penelitian ini membahas tentang money politik merupakan kejahatan yang terselubung dan juga merupakan salah satu penyakit (patologi) sosial masyarakat yang dapat merusak sendi-sendi tradisi dan budaya masyarakat. Bahkan mentalitas (kesadaran) bangsa, terutama generasi muda menjadi semakin terpuruk, sedangkan dalam penelitian saya lebih menitik beratkan pada praktek demokrasi dan pilihan rasional masyarakat memilih seorang pemimpin dalam pemilihan kepala desa tahun 2007 dan mengenai apakah masyarakat di dalam pemberian suara itu ada mobilisasi yang mempengaruhinya ataukah ada intervensi dari pihak lain.

3. Muh. Afik*, (Nurcholish Madjid; Pandangan tentang Demokratisasi di Indonesia tahun 1970-2005*[10]), meneliti tentang pemikiran Nurcholis

[9] Hasan Abdillah, *Money Politik Pilkades di Desa Tegal Ampel Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Islam.* (Skripsi Program Studi Jinasah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009).

[10] Muh. Afik, *Nurcholis Madjid; Pandangan Tentang Demokratisasi di Indonesia tahun 1970-2005.* (Skripsi Progam Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

madjid tentang Islam dan demokrasi ke Indonesiaan sedangkan penelitian yang akan saya teliti lebih menitik beratkan pada praktek demokrasi yang terjadi di dalam pemilihan khususnya yang ada di desa.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis memakai beberapa kerangka teori yang sekiranya sesuai dengan fokus kajian penelitian ini:

1. Demokrasi

Secara etimologis "demokrasi" terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan *cretien* atu *demokratos* (demokrasi) adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan rakyat.[11]

Menurut teks standar barat, demokrasi diartikan sebagai cara mengelola pemerintahan dan partisipasi warga negara di dalamnya. Salah satu teori dominan tentang demokrasi yang jamak diterima dalam wacana demokrasi barat adalah teori yang dikemukakan oleh Robert A Dahl. Menurut Dahl, karakteristik inti dari demokrasi memuat tiga hal. *Pertama*, adanya persaingan yang sehat untuk meraih posisi dalam pemerintahan; *kedua*, partisipasi warga negara dalam memilih para pemimpin politik dan *ketiga*, terselenggaranya kebebasan sipil dan politik, termasuk terjaminnya

[11] Ubaidillah, A. *Pendidikan Kewargaan Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani,* (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hlm. 138.

hak-hak asasi manusia. Rezim-rezim politik yang tidak memenuhi ketiga prasyarat ini dapat dikategorikan sebagai rezim otoritarian, sementara mereka yang telah dengan sempurna memenuhinya dapat dianggap telah demokratis (Martinussen, 1997: 195). Yang seperti diketahui bahwa di dalam diberlakukannya masa demokrasi justru penguatan masyarakat semakin melemah dibandingkan dengan di masa otoritarian bahwa penguatan masyarakat semakin kuat, di mana di bawah tentang penguatan masyarakat sipil akan diperjelas dibawah ini.

2. Penguatan Masyarakat Sipil (*civil society*)

Menurut Hendro Prasetyo, *masyarakat sipil* merupakan terwujudnya masyarakat yang memiliki kapasitas sebagai kekuatan pengimbang (*balancing force*) dari kecenderungan-kecenderungan dominatif dan intervensionis negara serta mampu melahirkan kekuatan kritis reflektif (*reflektif force*) di dalam masyarakat.[12]

Sedangkan definisi mengenai masyarakat sipil yang di mana Putman (1993) mendefinisikan masyarakat sipil sebagai seluruh sektor sukarela bukan demi keuntungan. Ia mengesampingkan keluarga, bisnis-bisnis dan organisasi yang tujuan utamanya adalah memenangkan suara pemilu dan memilih para politikus. Itu adalah praktek yang umum, tetap rasanya tidak ada gunanya untuk menetapkan batas-batas artifisial antara partai-partai politik dan organisasi-organisasi sosial.

[12]Lihat skripsi M. Zamroni Urfan, *Penguatan Civil Society Melalui Rencana Strategis; Studi terhadap Center and Democracy Studies, Cepdes di kabupaten Jombang*, (Yogyakarta: UIN SUKA, 2005)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Masyarakat sipil seringkali dipandang sebagai kunci untuk mencapai demokrasi dan membuat demokrasi (dan pembangunan ekonomi) sukses. Sayangnya, masyarakat sipil adalah konsep yang ambigu, ia mengacu pada sedikit-dikitnya dua situasi dan kondisi yang berlainan. Dalam situasi dan kondisi yang *pertama,* lembaga-lembaga sosial yang kuat dan mempunyai akar yang mendalam dalam masyarakat mempu melawan kontrol rezim-rezim otoriter. Dalam kasus *kedua,* ada jaringan organisasi-organisasi sosial yang rapat yang memberikan model dan memberikan sivilitas, kerja sama dan toleransi serta menciptakan hubungan antara seksi-seksi masyarakat yang mendorong partisipasi.[13]

Studi mengenai penguatan masyarakat sipil yang banyak dilakukan telah memberi arah bahwa penguatan masyarakat sipil akan berkorelasi dengan sejumlah elemen lain seperti otonomi, partisipasi dan kemandirian warganya. Hal ini berkaitan dengan pendapat Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Esay Choice: Political Participation in Developing Countries* bahwa partisipasi poltik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Dari berbagai definisi di atas, nampak ada perbedaan pandangan mengenai apa yang disebut *masyarakat sipil*. Namun kalau dielaborasikan lebih lanjut akan muncul garis persamaan dari pemahaman istilah tersebut,

[13] Pembahasan mengenai tipe-tipe masyarakat sipil ini dan argumen mengenai ambiguitas masyrakat sipil berangkat dari gagasan yang dikemukakan oleh Foley dan Edwards (1996), lihat di Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken (eds), *Politik Lokal di Indonesia,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 437

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yakni suatu istilah *civility* yang merupakan poin inti dari konsep tersebut. Menurut Robert W. Hefner sebagaimana dikutip Effendy, poin ini tidak hanya mrujuk pada kemakmuran negara, dan kebebasan berekspresi dan pilihan atas jalan hidup.[14]

3. Konsep Partisipasi Masyarakat

Konsep partisipasi masyarakat ada dua persepsi partisipasi di Indonesia yang berbeda antara persepsi yang diartikan masyarakat dengan yang dipersepsikan pemerintah. Di Indonesia, kata ini menjadi begitu sering digunakan siapapun sebagai strategi pembangunan dalam hampir setiap kesempatan, sehingga makna sebenarnya mulai terasa kabur. Para aparat pemerintah mengartikan partisipasi sebagai kemauan rakyat untuk mendukung suatu program yang direncanakan dari atas, bukan dari rakyat sendiri. Definisi tersebut pada dasarnya diartikan dengan istilah mobilisasi, sedangkan pengertian partisipasi menurut persepsi masyarakat mengandung suatu pengakuan, kreatifitas dan inisiatif dari rakyat sebagai modal dasar proses pelaksanaan pembangunan, dengan demikian masyarakat menciptakan pembangunan bukan melulu mendukung pembangunan.

Menurut Sutrisno (1995: 222) ada dua pengertian partisipasi yakni: *pertama*, partisipasi adalah dukungan masyarakat terhadap rencana/ proyek pembangunan yang dirancang dan tujuannya ditentukan

[14] Bahtiar Effendy, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan; Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani dan Etos Kewirausahaan*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 162

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

perencana; *kedua*, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. *Menurut Uphoff, Kohen, dan Goldsmith* (1979:4), pengertian partisipasi merupakan istilah deskriptif yang menunjukkan keterlibatan beberapa orang dengan jumlah signifikan dalam berbagai situasi atau tindakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Sedangkan menurut Muljarto Tjokrowinoto partisipasi adalah sebagai berikut:

> "Partisipasi adalah penyertaan mental serta emosi seseorang dalam suatu kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan daya pikir atau perasaan mereka bagi tercapainya tujuan organisasi dan bertanggungjawab terhadap organisasi tersebut."[15]

Partisipasi dalam hal ini yakni ikut serta seseorang dalam suatu kegiatan kelompok dalam masyarakat baik mental maupun fisik untuk tercapainya suatu tujuan organisasi. Di samping itu dalam partisipasi seseorang diberi kesempatan untuk menyumbangkan daya pikirnya untuk kemajuan kelompok organisasi dan ikut bertanggungjawab.

Menurut Mubyarto:

> "Partisipasi adalah kesediaan untuk membantu keberhasilannya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orangtanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri."[16]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[15] Muljarto Tjokrowinoto, *Beberapa Teknik dalam Hubungan Kerja*, (Yogyakarta: BPA, 1997), hlm. 2

[16] Mubyarto, *Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan*, (Yogyakarta: BPEF, 1988), hlm. 35

Mubyarto mendefinisikan partisipasi tidak hanya penyertaan mental dan fisik untuk kemajuan organisasi, namun juga tentang kesediaan seseorang untuk membantu organisasi kelompoknya untuk mencapai keberhasilan dalam setiap program yang diagendakan. Parisipasi dalam hal ini sesuai dengan kemampuan yang dimiliki seseorang dan sesuai dengan kelonggaran waktu yang dimiliki tanpa harus mengorbankan kepentingan pribadi.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan: pertama, bahwa partisipasi sesungguhnya merupakan keterlibatan mental dan perasaan lebih daripada sekedar keterlibatan fisik saja. Kedua, kesediaan partisipasi memberi sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Ketiga, unsur tanggungjawab yang merupakan segi yang mempunyai rasa menjadi anggota.

Partisipasi dapat dikatakan sebagai suatu reaksi terhadap adanya stimulan yang diberikan dari luar. Sebelum melakukan tindakan berupa partisipasi dalam kegiatan, individu menggunakan pikiran (Mind) untuk memberikan makna terhadap stimulan yang diberikan. Partisipasi terjadi ketika kelompok sasaran memberikan makna yang positif terhadap program yang akan dilaksanakan. Seperti yang dikemukakan oleh Weber bahwa tindakan sosial merupakan yang mengandung makna subyektif meliputi pengaruh positif dari situasi dan diarahkan pada orang lain.[17] Sedang yang dimaksud dalam uraian di atas adalah mengenai tentang

[17] George Ritzer Dalam Alimanda, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 45

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

partisipasi politik yang mencakup tidak hanya kegiatan yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, akan tetapi juga kegiatan yang oleh orang lain di luar si pelaku dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, di mana yang pertama dapat dinamakan partisipasi otonom, dan yang terakhir partisipasi yang dimobilisasikan.[18]

Sebuah pandangan minimalis terhadap partisipasi politik secara logis juga muncul dari asumsi-asumsi teori pilihan rasional. Menurut Olson (1971) dan Downs (1957) tidak adanya kemauan mayoritas orang untuk berpartisipasi bukanlah tanda kebodohan melainkan rasionalitas mereka. Dengan demikian, bagi kaum elit politik, partisipasi adalah rasional karena hal ini memberikan mereka kekuasaan dan prestise. Mobilisasi partisipan lain akan bergantung pada usaha menyakinkan mereka bahwa mereka bisa memperolah keuntungan langsung dari partisipasi tersebut, dan keuntungan ini melebihi biaya yang dikeluarkan. Maka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teori pilihan rasional.[19]

Pilihan rasional berakar dari model ekonomi pasar, di mana barang dan jasa dianggap dibuat dan dibeli oleh produsen dan konsumen yang rasional. Model ini tidak bisa dengan mudah diterapkan dalam politik di mana altruisme, ideologi, jaringan sosial, dan rasa kewarganegaraan

[18] Samuel P. Huntington, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang.* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 9.

[19] Keith Faulks, *Sosiologi Politik Pengantar Kritis,* (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 226-230.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

semuanya berperan dalam membentuk perilaku orang. Demikian juga, persoalan "*free rider*" akan menguat hanya jika kita menerima individualisme abstrak yang menjadi dasarnya. Lagi pula, akan sangat 'rasional' untuk membuang sampah ke jalan kereta di dekat rumah dibanding pergi lima mil ke tempat pembuangan sampah terdekat. Demikian juga, tanpa individu menganggap serius kewajiban kewarganegaraannya basis kebebasan kita dalam komunitas politik akan tergerus. Oleh karena itu, akan sangat rasional untuk berpartisipasi dalam politik. Bagi partisipasi politik: seorang pemberi suara yang bijaksana akan menilai kandidat secara rasional sebelum mereka memberikan suara.[20] Seperti dengan apa yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di Desa Dorang tahun 2007 apakah masyarakat memberikan suaranya dengan menggunakan pilihan rasional atau justru ada mobilisasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan masyarakat.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor metodologi kualitatif sebagai prosedur penilaian yang menghasilkan data deskripsi sebuah kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh). Penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Metode deskriptif artinya memberikan gambaran dan melaporkan

[20] *Ibid.*, hlm. 232

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

apa adanya yang diperoleh dari penelitian.[21] Sedangkan penelitian deskriptif-kualitatif merupakan penelitian tentang fenomena yang ada pada saat ini dan mempunyai manfaat untuk meneliti gejala sosial yang ada dalam suatu masyarakat karena bersifat subyektif.[22]

1. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian akan dilakukan di desa Dorang, kecamatan Nalumsari kabupaten Jepara provinsi Jateng. Adapun pengambilan lokasi bisa di desa tersebut, itu dikarenakan di desa tersebutlah terjadi fenomena menarik yang terjadi di dalam pemilihan kepala desa di Desa Dorang yaitu ada sebuah mobilisasi partisipasi terhadap masyarakat di dalam proses pemilihan kepala desa tersebut yang terkait dengan pemilihan kepala desa di tahun 2007.

2. Sumber Data

   Sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Dorang (salah satu desa yang ada di Jepara). Secara sederhana data yang akan digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dihimpun dari hasil observasi dan wawancara dengan informan yaitu masyarakat desa Dorang. Sedangkan data sekunder dapat diperoleh melalui buku-buku karya ilmiah, tulisan wartawan di surat kabar maupun majalah dan dokumentasi yang berhubungan langsung dengan data yang akan diambil.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[21] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 115.

[22] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm. 68-69.

3. Penentuan Subjek

Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling digunakan dalam rangka membangun generisasi teoritik. Dalam penelitian kualitatif, sampling yang diambil lebih selektif. Penelitian didasarkan pada landasan kaitan teori yang digunakan, keingintahuan pribadi karakteristik empiris yang dihadapi, dan sebagainya. Sumber data digunakan dalam rangka tidak mewakili populasinya tetapi lebih cenderung lebih mewakili informasinya. Karena pengambilan cuplikan didasarkan atas berbagai pertimbangan, maka pengertiannya sejajar dengan jenis teknik sampling yang dikenal sebagai "*purposive sampling*" yaitu anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian.[23] Dengan kecenderungan peneliti untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap Selain itu juga agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam dari dunia konseptual para subjek yang diteliti. Masyarakat yang diambil sebagai informan yaitu masyarakat desa Dorang, yang di mana terbagi ke dalam berbagai macam, ada yang berdasarkan tingkat status ekonomi, pendidikan, tingkat umur, dan sesuai jenis kelamin, yang di mana nantinya dapat mewakili dari semua kalangan masyarakat. Bilamana dalam proses pengumpulan data sudah tidak lagi di temukan variasi informasinya maka penelitian ini tidak perlu mencari

[23] Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 47.

informasi baru dan proses pengumpulan informasi ini dianggap sudah selesai.[24]

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data yang akurat, bernilai validitas tinggi, perlu memperhatikan sumber data "dari mana" data yang akan diperoleh dan metode pengumpulan data yang tepat. Sumber data dalam penelitian kualitatif menurut Lofland terdiri dari sumber data utama berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh secara langsung.[25] Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Untuk mendapatkan data yang valid, penelitian in akan menggunakan metode observasi dan wawancara sebagai data primer.

1) Observasi

Observasi adalah sebagai cara menghimpun data atau keterangan yang dilakukan dengan cara pengamatan atau pencatatan sistematik terhadap gejala-gejala yang terjadi, demi mendapatkan data yang jelas dari obyek yang di teliti.[26]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[24] Burhan Bungin, *Analisis data Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 53.

[25] Seperti yang dikutip Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 112.

[26] Anas Sudjono, *Teknik dan Evaluasi Pengantar*, (Yogyakarta: UP. Rama, 1986).

Mengingat kegiatan pemilihan kepala desanya sudah lampau, maka penelitian ini di dalam melakukan observasi lebih kepada tempat yang akan diteliti dan bagaimana kehidupan masyarakat disana terkait di dalam penentuan subyek.

2) Wawancara

Metode wawancara atau interview merupakan bentuk komunikasi verbal atau percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari obyek. Interview ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan yaitu sang peneliti itu sendiri dan yang diwawancarai (interviewer) yaitu warga masyarakat Desa Dorang, yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.[27]

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka dan mendalam (*indepth interview*).[28] Wawancara dengan informan dilakukan dengan ngobrol santai tetapi tidak lepas dari pedoman wawancara sehingga di dalam melakukan wawancara dengan informan menjadi terarah sehingga tercapai apa yang diinginkan oleh peneliti, yang pelaksanaannya berselang-seling

[27] Lexy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 186

[28] Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Lainnya,* (Bandung: Rosda Karya, 2002), hlm. 62

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

atau bersama-sama dengan pelaksanaan observasi. Hasil wawancara dengan seorang informan diuji silang (cek dan ricek) dengan hasil wawancara pada informan lain serta dengan hasil observasi, sehingga diperoleh data dan pemahaman yang lebih objektif dan akurat serta jelas. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Dorang tersebut yang di mana akan diambil beberapa misalkan disesuaikan dengan beberapa kategori, yaitu dilihat dari pendidikan, ekonomi, jenis kelamin, umur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pustaka-pustaka, literatur serta dokumen yang menunjang. Dokumentasi ini dapat berupa buku-buku, ensiklopedi, majalah, makalah, jurnal-jurnal, internet, serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, photo-photo juga termasuk pada data sekunder karena dapat menjadi data tambahan yang terbentuk visual. Tujuan dari dilakukannya pencarian data sekunder ini untuk mendukung data primer yang diperoleh di lapangan.[29]

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi, penyajian data, dan

[29] Nasution, *Metode Research Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 106.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penarikan kesimpulan.[30] Proses dari analisis data dengan menggunakan tiga alur kegiatan tersebut sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai pemilihan, pemusatan penelitian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan dari lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus dalam proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Selanjutnya dilakukan pemilihan data dan pemberian kode, data mana yang dibuang atau pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, dan catatan-catatan apa yang sedang berkembang.[31]

b. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai kegiatan untuk menyusun informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data akan dapat dipahami apa yang sedang terjadi. Apa yang harus dilakukan dan lebih jauh lagi menganalisis atau mengambil data berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.[32]

c. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian bukanlah merupakan suatu karangan atau diambil dari pembicaraan-pembicaraan lain. Akan tetapi

[30] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif....*, hlm. 16.
[31] Seperti dikutip Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Rosda Karya, 2003), hlm. 193.
[32] *Ibid.* hlm. 194.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hasil suatu proses tertentu yaitu "menarik" dalam arti "memindahkan" sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Menarik kesimpulan penelitian selalu harus berdasarkan diri atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan harus berdasarkan atas data, bukan atas angan-angan atau keinginan peneliti. Adalah salah besar apabila peneliti membuat kesimpulan yang bertujuan menyenangkan hati pemesan, dengan cara memanipulasi data.[33]

H. Sistematika Pembahasan

Sebagai sebuah penelitian ilmiah maka perlu adanya pembahasan yang memiliki kekuatan logika yang sistematis, oleh karena itu dalam skripsi ini akan membahas beberapa hal yang terdiri dari lima bab, masing-masing bab tersdiri dari beberapa sub-bab yang termuat dalam pembahasan.

Bab pertama, tentang pendahuluan yang memuat segi-segi pertanggungjawaban teknis dan ilmiah penulisan skripsi dan sekaligus mengantarkan skripsi secara keseluruhan, aspek-aspek pertanggungjawaban teknis dan ilmiah yang dikemukakan dalam bab ini meliputi tentang latar belakang masalah, yang memuat kegelisahan penulis. Rumusan masalah, dibuat untuk memfokuskan masalah penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian digunakan untuk mengetahui tujuan dari penelitian tersebut. Tinjauan pustaka, digunakan untuk mendapatkan penelitian yang masih

[33] *Ibid.* hlm. 195.

otentik. Kerangka teori sebagai landasan untuk berpijak dan menganalisis data yang telah terkumpul. Metode penelitian secara umum membahas bagaimana penelitian dilakukan. Dan sistematika pembahasan, yang berisi tentang sub-sub bab yang akan dibahas.

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum wilayah penelitian. Dalam bab ini akan membahas letak geografis, yaitu untuk mengetahui letak posisi wilayah penelitian dan juga berisi tentang setting sosial masyarakat di desa Dorang. Meliputi profil masyarakat, bagaimana sistem mata pencaharian di desa tersebut, bagaimana kehidupan sosial sehari-hari masyarakat di desa tersebut.

Bab ketiga, berisi tentang hasil temuan selama melakukan proses penelitian di Desa Dorang, yang meliputi partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Dorang berikut analisis sosiologisnya. Dalam bab ini juga akan diuraikan faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi masyarakat dalam berpartisipasi pemilihan kepala desa di desa Dorang dan juga menguraikan jalannya demokrasi di dalam pemilihan kepala desa tersebut dengan pemilihan kepala desa sebelum-sebelumnya.

Bab keempat, adalah penutup, yang akan berisi mengenai kesimpulan dan saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

PILKADA langsung yang telah ada merupakan usaha pemerintah untuk mengikutsertakan masyarakat dalam proyek pembangunan di negara ini. Dalam pilkada, diharapkan masyarakat dapat memilih calon yang akan menjadi wakil mereka di kursi pemerintahan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dalam pilkada langsung tersebut agar hak-hak yang mereka miliki tidak diambil oleh orang lain.

Partisipasi masyarakat dalam PILKADA sebenarnya sangat berperan dalam usaha merealisasikan wacana demokrasi yang sedang diusung oleh pemerintah kita. Demokrasi yang ada (dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat) memang diyakini oleh setiap lapisan masyarakat akan banyak membantu dalam mewujudkan suatu keadilan social seperti yang tercantum dalam pancasila sila kelima. Akan tetapi, khasanah yang ada dalam demokrasi seakan-akan tertutup oleh banyaknya persaingan yang muncul akibat dari perebutan kekuasaan. Seperti yang terjadi di Desa Dorang tersebut, kita dapat melihat bagaimana khasanah demokrasi tergores oleh isu-isu dari praktek *money politic* para calon kepala desa itu. Para calon seperti tidak mengindahkan tujuan utama dari proses demokrasi tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi dalam konsep demokrasi di negara kita ini, dan mengapa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hal itu seakan-akan telah mendarah daging dalam tubuh masyarakat kita sehingga kita sulit untuk menghapusnya.

Dengan adanya kasus *money politic* yang mencoreng perwujudan demokrasi dalam partisipasi masyarakat tersebut, hendaknya menjadi suatu pelajaran bagi pemerintah kita agar dapat menuntaskan masalah tersebut. Setidaknya dengan belajar dari pengalaman, kegagalan di masa lalu sedikit mungkin dapat dicegah dengan visi dan implementasi baru. Demokrasi ,harus kita akui, sebagai terobosan yang paling baik yang diambil oleh pemerintah kita yang saat itu kepercayaan masyarakat telah hilang kepada para pemimpinan. Akan tetapi dalam prakteknya, demokrasi hanyalah sebagai "pemanis" dari pahitnya paktek demokrasi yang terjadi.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil pembahasan seluruhnya dari penelitian ini bahwa, uang bukanlah segalanya seperti halnya apa yang terjadi di dalam pemilihan kepala desa tersebut, karena masyarakat melakukan pemilihan bukan didasari oleh pemberian uang, tetapi dikarenakan mereka dengan kesadaran diri dan tidak terpengaruh dengan adanya mobilisasi di dalamnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran-saran

1. Bagi aparat hukum, upayakan agar senantiasa memberantas atau paling tidak meminimalisir adanya kecenderungan praktik politik uang dalam setiap momentum pemilihan Kepala Desa (pilkades).

2. Diharapkan bagi para ulama dan tokoh masyarakat agar senantiasa memberikan pencerahan, wejangan dan pengertian kepada masyarakat agar tidak mudah melakukan dan menerima adanya praktik politik uang dengan segala alasan apapun.
3. Bagi para calon kepala desa agar senantiasa mawas diri akan segala kelebihan dan kekurangannya sehingga dia bisa benar-benar memiliki rasa percaya diri yang mantap dan siap untuk bersaing dengan kandidat lainnya secara fair dan jujur, bahkan juga siap untuk menang dan kalah tanpa harus melakukan cara-cara yang kotor seperti politik uang.
4. Diharapkan bagi segenap lapisan masyarakat agar tak gampang terpengaruh dengan iming-iming dan janji-janji muluk dari seorang calon kepala desa. Kenapa? Karena ranah politik tak kenal janji atau iming-iming, dan yang ada hanyalah sebuah strategi untuk menang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Dahl, Robert, 1992, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya, alih bahasa A. Rahman Tainuddin,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Abdillah, Maskuri, 1999, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Demokrasi (1966-1993)*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Ainun Najib, Emha, 2009, *Demokrasi La Roiba Fih*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Amin Rais, M, 1986, *Demokrasi dan Proses Politik, Pengantar dalam Demokrasi dan Proses Poltik, Seri Prisma,* Jakarta: LP3ES.

Arikunto, Suharsimi, 1991, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Baechler, Jean, 2001, *Demokrasi Sebuah Tinjauan Analitis*, Yogyakarta: Kanisius,

Budiardjo, Miriam, 1997, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

_____, 1996, *Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Culla, Adi Suryadi, 1999, *Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi*, Jakarta: Raja Grafindo, Persada.

Effendy, Bahtiar, 2001, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan; Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani dan Etos Kewirausahaan*, Yogyakarta: Galang Press..

Eko, Sutoro, 2003, *Transisi Demokrasi Indonesia Runtuhnya Rezim Orde Baru*, Yogyakarta: APMD Press.

Faulks, Keith, 2010, *Sosiologi Politik Pengantar Kritis,* Bandung: Nusa Media.

Gaffar, Afan, 2002, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi,* cet.ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Ghofur, Abdul , 2002, *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia: Studi Atas Pemikiran Abdurrahman Wahid*, Yogya: Wali Songo Press dan Pustaka Pelajar.

Hais, Syamsuddin, 1995, *Demokrasi di Indonesia Gagasan dan Pengalaman,* Jakarta: LP3ES.

Hikam, AS, 1996, *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: Pustaka LP3ES.

Huda, Ni'matul, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicia Review*, Yogyakarta: UII Press.

J. Moleong, Lexy, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

Jary, David and Julia Jary, 1999, *Collins Dictionary of Sociology*, Glasgow: Harper Collins Publisher..

Magnis Suseno, Franz, 1992, *Demokrasi Sebagai Proses Pembebasan: Tinjauan Filosofis dan Historis. Dari seminar sehari: Agama dan Demokrasi,* Jakarta: Perhimpunan Pembangunan Pesantren dan Masyarakat (P3M) bekerjasama dengan Fedrich Nauman Stiftung (FNS).

_____, 2001. *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern,* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Masdar, Umarudin, 1999, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mubyarto, 1998, *Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan*, Yogyakarta: BPEF.

Mulyana, Dedy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Lainnya,* Bandung: Rosda Karya.

Nasution, 2004, *Metode Research Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Nugroho, Heru, 2002, *Menumbuhkan Ide-ide Kritis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

P. Huntington, Samuel, 1994, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta.

Pranarka, A.M.W dan Vidhyadhika Moeljarto, 1996, *Pemberdayaan (Empowerment), Dalam Pemberdayaan Konsep, Kebijaksanaan dan Implementasi,* Yogyakarta: CSIS.

Prasetyo, Hendro, dan Ali Munhanif, dkk, 2002, *Islam dan Civil Society Pandangan Muslim Indonesia,* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Revitch, Diane & Abigai Thernstrom (ed), 2005, *Demokrasi: Klasik & Modern*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Ritzer, George Dalam Alimanda, 1992, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Pers.

Rohyati, Any dkk, 2006, *Pilkada Dan Pengembangan Demokrasi Lokal.* Yogyakarta: Komisi Pemilihan Umum Provinsi DIY.

Scmandt, Henry J, 2002, *Filsafat Politik Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Slamet, Margono, 1988, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pedesaan*, Bandung: Alumni.

Suprayogo, Imam dan Tobroni, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Rosda Karya.

Tjokrowinoto, Muljarto, 1997, *Beberapa Teknik dalam Hubungan Kerja*, Yogyakarta: BPA.

Uhli, Anders, 1998, *Oposisi Berserak: Arus Deras Gelombang Demokratisasi di Indonesia*, Bandung: Mizan.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, 1996, *Metodologi*, Jakarta: Bumi Aksara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA